KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Menteri Agus Marto Janji Perbaiki Kualitas Laporan Keuangan : BAKN Serahkan Kasus yang Rugikan Negara 1,14 Triliun
Tanggal : Rabu, 12 September 2012
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 13

Menteri Agus Marto Janji Perbaiki Kualitas Laporan Keuangan

BAKN Serahkan Kasus Yang Rugikan Negara 1,14 Triliun

Menteri Keuangan Agus Martowardojo berjanji akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di birokrasi pemerintah. DPR menyoroti hasil audit BPK terhadap tiga kasus di kementerian yang merugikan negara hingga Rp 1,147 triliun.

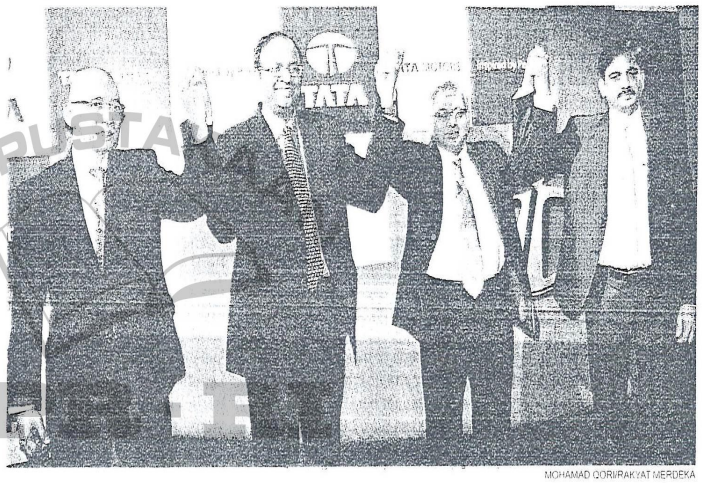

MOHAMAD QORI/RAKYAT MERDEKA

ANGKAT TANGAN: Tata Motors serius menggarap pasar otomotif nasional. Dari kiri. Legal Director PT Tata Motors Indonesia Achmad Djauhari, President Director PT Tata Motors Indonesia Biswadev Sengupta, Executive Director Tata Motors Ltd Ravindra Pisharody dan Head Distribution PT Tata Motors Indonesia Pankaj Jain mengangkat tangan saat peresmian Tata Motors di Jakarta, kemarin.

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan transaparansi dan kualitas laporan keuangan. Menurut Agus Marto, penyelenggaraan raker tersebut untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dengan kualitas terbaik melalui tindakan nyata dan jelas dari setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Raker tersebut mengambil tema "Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah dalam rangka Mewujudkan Laporan Keuangan tahun 2012 dengan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP)."

"Sekaligus menyatukan pemahaman atas temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan temuan audit tersebut," katanya di Jakarta, kemarin.

Namun berbeda dengan yang dikemukakan Menkeu, kalangan DPR dalam Rapat Paripurna akhirnya menerima dan mensahkan laporan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR terkait temuan audit BPK di tiga bidang.

Tiga bidang yang dimaksud adalah temuan dalam kepatuhan kewajiban perpajakan yang membuat hilangnya potensi penerimaan negara sebesar Rp 368,70 miliar, laporan audit pengadaan barang dan jasa dan rekening liar di Kemendiknas dan 16 universitas negeri, serta audit pengadaan sarana dan prasarana pabrik vaksin flu burung di Kemenkes.

Anggota BAKN Sumaryati Arjoso membacakan kesimpulan dari temuan-temuan itu. Selain kerugian penerimaan pajak Rp 368,70 miliar, negara juga dirugikan dalam kasus-kasus di Kemendiknas sekitar Rp 309 miliar dan Rp 468,98 miliar di proyek pabrik vaksin flu burung. Jadi kalau ditotal kerugian negara dari ketiga kasus ini mencapai Rp 1,147 triliun.

Untuk kasus kepatuhan kewajiban perpajakan, berdasarkan hasil uji petik BPK di beberapa Kementerian, Sumaryati menyatakan BAKN menyimpulkan bahwa bendaharawan kementerian/lembaga pemerintah pusat dan pemda melakukan kesalahan dalam pengenaan dan pemungutan pajak. "Bentuknya kesalahan dalam pengenaan jenis pajak, kesalahan dalam pengenaan tarif pajak, kesalahan dalam penetapan dasar pengenaan pajak, dan kesalahan karena tidak melakukan pemotongan pajak," kata Sumaryati di Jakarta, kemarin.

Karena itu, BAKN merekomendasikan agar hal itu segera ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seluruh rekomendasi itu diterima oleh seluruh fraksi yang mengikuti rapat paripurna itu.

Dalam berbagai kesempatan, Mendiknas M Nuh membantah hasil audit BPK terkait dugaan korupsi proyek pengadaan laboratorium di 16 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Proyek laboratorium tersebut diklaim tidak ada indikasi korupsi. ■ HEN/LAN